

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Makalah

Harsono, Boedi, 1996. Hukum Agraria Indonesia – Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksanaannya - Jilid II – Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Djambatan

Harsono, Boedi, 1971. Undang-Undang Pokok Agraria. Jakarta: Djambatan

Soetojo, M, 1961. Undang-Undang Pokok Agraria dan Pelaksanaan Landreform. Jakarta: Diterbitkan oleh Staf Penguasa Perang Tertinggi

Hasinuddin, 2004. Redistribusi Tanah Objek Landreform Berwawasan Lingkungan di Kota Medan: Tesis PPs USU, Medan

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960. Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor. 56 Prp Tahun 1960. Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 Ayat 3. Berisi Tentang “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Undang-Undang Nomor. 56 Tahun 1960. Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 7 dan 17. Tentang Sumber Pengaturan Pembatasan Luas Tanah Maksimum.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Pasal 10. Tentang Larangan Tanah *Absentee*.

Peraturan Pemerintah Nomor. 41 Tahun 1964. Tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi.

Keppres Nomor. 55 Tahun 1980. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Land Reform.

Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999. Tentang Pemerintahan Daerah.

Ketetapan MPRS No II/MPRS/1960. Tentang Garis-garis Pola Pembangunan Nasional Semesta.

Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal 19 Ayat 1. Tentang Pendaftaran Tanah.

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1960. Tentang Bagi Hasil.

Peraturan Pemerintah Nomor. 224 Tahun 1961. "Tentang pembagian tanah dan pemberian ganti rugi.

